



Bangkai pesawat tempur milik TNI AU yang jatuh dan terbakar di Kampar, Riau.

KR-Antara

Pesawat Hawk Jatuh Usai Latihan Tempur

RIAU (KR) - Asap tampak membubung dari puing-puing pesawat tempur Hawk 0209 TT milik TNI AU yang jatuh dan terbakar di daerah permukiman penduduk di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (15/6) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan, Hawk 0209 TT itu baru selesai melaksanakan misi latihan tempur di Siabu. Ada tiga pesawat yang terbang ke areal latihan militer Siabu, Kampar pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Satu jam kemudian, pesawat itu menyelesaikan misi dan kembali ke Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin.

"Ketiga pesawat selesai melaksanakan latihan penembakan di Siabu akan kembali untuk mendarat. Pada saat kembali, pesawat berurutan pesawat 1, 2 dan 3. Yang kecelakaan itu posisi terakhir, ke-3," ungkap KSAU di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Senin siang.

Dijelaskan, sesaat sebelum jatuh, Lettu Pnb Aprianto Ismail, pilot tunggal pesawat itu sempat melaporkan terjadi kegan-

jalan pada bagian mesin. Kemudian, lampu indikator peringatan juga menyala yang mengindikasikan adanya kerusakan bagian mesin.

Selain itu, pilot sempat merasakan adanya suara ledakan pada bagian mesin hingga mesin pesawat buatan Inggris itu benar-benar kehilangan daya (*lost power*) hingga terhempas dan jatuh menimpa rumah warga. Lokasi jatuhnya pesawat, sekitar 2 km dari ujung landasan. Pesawat diketahui berada 500 kaki ketika kehilangan tenaga kemudian jatuh menimpa rumah warga.

Beruntung, rumah warga yang hancur akibat tertimpa badan burung besi itu dalam keadaan kosong. Fadjar juga memastikan kondisi pilot dalam keadaan baik dan tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

"Saat itu komunikasi masih normal dan pilot memutuskan untuk *eject* dengan kursi pelontar," tuturnya. Warga pun sempat membantu pilot yang terjun dengan parasut setelah menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Selanjutnya pilot dirawat di rumah sakit. **(San/Ant)-d**

MUI MENOLAK SEMUA ISI RUU HIP

Muhammadiyah Minta Tak Dilanjutkan

YOGYA (KR) - Muhammadiyah mendesak DPR lebih sensitif dan akomodatif terhadap arus aspirasi terbesar masyarakat Indonesia yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal itu dilakukan dengan tidak memaksakan diri melanjutkan pembahasan RUU tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam situasi seperti sekarang, hendaknya mengutamakan persatuan, kemajuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Dr Abdul Mu'ti menyampaikan hal itu dalam pernyataan sikap secara daring dari Kantor PP Muhammadiyah, Senin (15/6). Sikap tersebut disampaikan Muhammadiyah terkait RUU HIP yang mendapat penolakan di mana-mana. "Pimpinan Pusat Mu-

hammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi UU," tandas Mu'ti yang didampingi pengurus PP Muhammadiyah, di antaranya Dr Anwar Abbas.

Pernyataan senada disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak semua isi RUU HIP. MUI menilai, RUU tersebut tidak dibutuhkan untuk dibahas di saat bangsa, negara dan masyarakat menghadapi pandemi virus Korona atau Covid-19. Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, sesungguhnya

RUU HIP tidak dibutuhkan saat ini pada waktu negara sedang berupaya maksimal mengatasi masalah pandemi Covid-19. Sehingga, semua RUU ditunda pembahasannya. "Kita fokus pada upaya penyelamatan bangsa dan rakyat dari virus ini," kata KH Muhyiddin, kemarin.

MUI melihat RUU HIP bukan hal yang primer saat ini. Artinya DPR sudah salah memutuskan untuk tetap membahas RUU HIP. DPR adalah perwakilan rakyat seharusnya mereka memperhatikan aspirasi rakyat, DPR jangan punya agenda sendiri.

Menurut Muhammadiyah, DPR maupun pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya secara politik dapat menetapkan atau memutuskan apapun dengan mengabaikan aspirasi publik. Tetapi politik demokrasi juga menis-

cayakan *checks and balances* serta agregasi aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai perwujudan jiwa dan semangat gotong royong dan permusyawaratan. Lebihnya secara moral segala bentuk kekuasaan harus ditunaikan dengan benar dan amanah karena bagi orang yang Berketuhanan Yang Maha Esa serta beragama semua amanat harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa," kata Mu'ti.

Muhammadiyah melihat, RUU RUU HIP mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, sehingga jika pembahasan dipaksakan dilanjutkan, berpotensi menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif dan membuka kembali perdebatan dan polemik ideologis dalam sejarah perumusan Pancasila yang sudah berakhir.

(Fsy/Obi)-d

KASUS SUAP DI MA

KPK Panggil Istri Nurhadi, Tak Hadir

JAKARTA (KR) - Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Sehubungan hal itu, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Tin Zuraida pada Senin (22/6).

"Hari ini (Senin) Tin Zuraida tidak datang memenuhi panggilan penyidik karena sakit. Untuk itu, KPK menjadwalkan ulang pada Senin (22/6). Tin dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/6).

Pada hari yang sama, tuturnya, KPK juga memanggil dua saksi lain terkait kasus tersebut dan juga tidak hadir yakni buruh harian lepas atas nama Hamaji dan seorang pegawai negeri sipil bernama Royani. Sementara, saksi yang hadir pemeriksaan KPK hanya atas nama Sofyan Rosada.

Tin, jelas Ali, rencananya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hiendra Soenjoto. Sebelumnya, Tin juga tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada 11 Februari dan 24 Februari 2020. Tin, bahkan sempat diamankan tim KPK saat penangkapan suaminya dan Rezky Herbiyono (RHE), menantu Nurhadi di salah satu rumah di Jakarta, Senin (1/6). **(Ful)-d**

PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER

Saat Pandemi, Anggaran Membengkak

YOGYA (KR) - Setelah sempat tertunda karena pandemi Covid, Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember. Keputusan untuk mengadakan Pilkada pada 9 Desember itu dilakukan, karena dalam kondisi pandemi Covid-19 pemerintahan pusat dan daerah harus tetap berjalan normal.

"Pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Untuk itu Pilkada Serentak 2020 perlu dilaksanakan agar pemerintahan berjalan normal dan tidak dipimpin Penjabat (Pj)," kata Menkopolkum Prof Dr Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke Pemda DIY dalam rangka monitoring dan rapat koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak di Gedhong Pracimono Kompleks Kepatihan, Senin (15/6).

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Ha-



KR-Fira Nurfitriani

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan keterangan pers.

mengku Buwono X, mengatakan bahwa secara prinsip, DIY telah siap menyelenggarakan Pilkada 2020 yang aman dan sesuai dengan kaidah atau protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19. "Kita siap melaksanakan Pilkada, bahkan perencanaan sudah dilakukan dan pelaksanaan mulai hari ini, 15 Juni ini. Jadi tidak perlu diundur

lagi," ujar Sultan.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU DIY, Wawan Budiyanto mengungkapkan, persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai. Yang telah dilakukan KPU DIY ialah konsolidasi anggaran di tiga kabupaten yang mencapai Rp 74,5 miliar.

Meski telah berhasil menghemat anggaran

hingga Rp 4,4 miliar, namun di sisi lain KPU DIY menghadapi tantangan kebutuhan akan kondisi pandemi. "Sesuai protap Covid-19, pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini harus dilakukan penambahan jumlah TPS. Jika dulunya tiap TPS melayani 800 pemilih, sekarang diperkirakan hanya 500 pemilih per-TPS. Belum lagi penyiapan alat pelindung diri bagi seluruh petugas. Tentu dua komponen ini saja mampu menambah anggaran," imbuhnya.

Sedangkan Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan pihaknya menyiapkan tambahan anggaran Rp 5 miliar, tetapi kami juga mengajukan ke Pemerintah Pusat agar bisa ditambahkan lebih dari angka tersebut. Kami usulkan tambahan dari APBN sebesar Rp 11,4 miliar yang harapannya bisa dipenuhi," tandasnya. **(Ria/Ira)-d**

ADA TAMBAHAN TIGA KASUS POSITIF

Di Antaranya Terkait Pedagang Ikan

YOGYA (KR) - Kasus positif virus Korona (Covid-19) masih terus muncul di DIY. Kali ini bertambah tiga kasus positif sehingga total berjumlah 272 kasus. Kasus kesembuhan pun bertambah meskipun hanya satu kasus sembuh dan satu Pasien Dalam Pengawasan (PDP) meninggal dunia dari hasil laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Korona, Berty Murtiningsih menyampaikan hasil pemeriksaan laboratorium dan terkonfirmasi positif terdapat tambahan 3 kasus positif, sehingga total kasus positif Covid-19 di DIY menjadi sebanyak 272 kasus.

Penambahan kasus positif tersebut adalah kasus 272 perempuan (29) warga Kota Yogyakarta dengan riwayat kontak dengan kasus 248, kasus 273 laki-laki, (35) warga Gunungkidul dengan riwayat hasil tracing suplayer (pedagang) ikan dan kasus 274 laki-laki (35) warga Bantul dengan riwayat masih dalam penelusuran Dinkes Bantul.

"Laporan kesembuhan kasus positif ada 1 kasus sembuh dengan total kasus sembuh menjadi 211 kasus di DIY. Satu kasus sembuh tersebut yaitu kasus 237 perempuan (50) warga Sleman. Ditambah ada

satu PDP meninggal dalam proses yakni seorang laki-laki (56) warga Sleman yang belum sempat swab dan RDT nonreaktif," tutur Berty di Yogyakarta, Senin (15/6).

Berty menjelaskan jumlah sampel yang telah diperiksa mencapai 354 sampel dan 297 orang di DIY. Total PDP di DIY mencapai 1.718 orang dengan 88 orang masih dalam perawatan dan total Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 7.199 orang.

"Sebanyak 272 orang dinyatakan positif dengan 211 orang di antaranya sembuh dan 8 orang meninggal dunia serta 1.294 orang dinyatakan negatif dari hasil laboratorium. Yang masih proses masih ada sebanyak 152 orang dengan 24 orang di antaranya telah meninggal dunia," imbuh Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY tersebut.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, meski pengetatan terhadap pengunjung di Kawasan Malioboro sudah berlangsung baik. Tapi dirinya berharap kondisi itu bisa dilakukan secara tersistem dan berkelanjutan. Dengan begitu, kenormalan baru yang harus senantiasa mengedepankan protokol Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. **(Ira/Ria)-d**

Pasien Sembuh Terus Bertambah

MAGELANG (KR) - Pasien sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (15/6), kembali bertambah lima orang. Tiga dari Kecamatan Secang, dua lainnya dari Kecamatan Dukun dan Salaman. Selain itu dua Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga sembuh. Mereka dari Kecamatan Mertoyudan dan Tegalrejo.

"Dengan tambahan lima positif sembuh, total kumulatif pasien terkonfirmasi positif sembuh menjadi 85 orang. Untuk PDP sembuh, total kumulatif 163 orang. Semoga semakin banyak pasien sembuh baik dari positif maupun PDP. Dengan begitu, pandemi Covid-19 akan segera berakhir," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Magelang Nanda Cahyadi Pribadi.

Namun kemarin juga ada tambahan satu positif dari alih status PDP dari Kecamatan Bandongan.

Namun tidak diketahui riwayatnya. Sehingga jumlah pasien positif Covid-19 menjadi 48 orang, terdiri 40 orang dirawat dan delapan menjalani isolasi mandiri.

Kasus positif Covid-19 di Kota Magelang tambah dua orang, sehingga kumulatif menjadi 33 orang (20 sembuh, delapan dirawat, satu pulang dipantau dan empat meninggal dunia).

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Majid Rohmawanto mengatakan, kedua orang tersebut ada satu orang karyawan yang bertugas di Kabupaten Magelang ber-KTP Kota Magelang dan satunya lagi seorang anak usia 13 tahun yang baru datang dari luar Jawa. Anak ini dari bandara langsung dirujuk ke RST dr Soedjono Kota Magelang.

Jubir GTPP Covid-19 Kabupaten Temanggung Gotri Wijiyanto mengatakan, tiga PDP meninggal dan dikamkamkan sesuai protokol kesehat-

an. Ketiganya warga Kraggan karena punya riwayat sesak napas, warga Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran punya riwayat stroke, dan warga Desa Kemiriombo, Kecamatan Gemawang punya riwayat penyakit gula. Kemarin tidak ada penambahan kasus positif Covid-19.

Jubir GTPP Covid-19 Pemkab Wonosobo dr Mohammad Riyatno mengatakan, jumlah kumulatif positif Covid-19 mencapai 90 kasus. Tingkat kesembuhan pasien cukup tinggi, mencapai 67 orang atau sekitar 74 persen, sedangkan pasien positif dirawat di rumah sakit tinggal 23 orang.

"Potensi kesembuhan pasien Covid-19 di Wonosobo diyakini masih terus berlanjut. Apalagi sebagian besar dari pasien positif yang masih dirawat di rumah sakit hanya mengalami gejala ringan, sehingga potensi sembuh sangat besar," katanya.

(Bag/Tha/Osy/Art)-a



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

MULAI BANGKIT: Seorang perajin membentuk pola sandal jepit di Kepu-tran, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah, Senin (15/6). Menurut perajin, setelah tidak produksi akibat dampak pandemi Covid-19, kerajinan sandal jepit dari bahan dasar spon eva mulai bangkit dan telah memenuhi permintaan awal 300 pasang yang dijual Rp 15.000-Rp 17.500 tergantung ukurannya.